

IMPLEMENTASI STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN BONDOWOSO

(Studi di Kabupaten Bondowoso)

Oleh :

Mutiara Dian Prasasti (1410511054)

Dosen Pembimbing : Drs. Kahar Haerah, M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Jember
Jalan Karimaata 49 Telp/Fax (0331) 336728 (112) / 337957 Kotak Pos 104 jember

ABSTRAK

Pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso memiliki hambatan dalam pelaksanaannya, seperti adanya penumpukan sampah di TPA yang tidak dapat dikeloas sesuai dengan standarnya. Dengan jumlah produksi sampah yang dihasilkan terus meningkat maka berpengaruh pada pengelolaan sampah di TPA. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang Implementasi Strategi Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Bondowoso. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimana penulis berusaha menggambarkan tentang suatu keadaan atau fenomena sosial tertentu. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis penelitian menggunakan analisis data model interaktif yang meliputi *Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data dan Concluding Drawing/Verification*. Dari hasil penelitian ini dalam Implementasi Strategi Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Bondowoso yang dilakukan yaitu 1. Pengangkutan Sampah, 2. Perluasan Lahan TPA, 3. Pengelolaan Sampah di TPA. Berdasarkan hasil penelitian ini implementasi strategi pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Bondowoso belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian ini juga dapat diketahui faktor yang mempengaruhi dalam implementasi strategi pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso. Terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukungnya adalah 1. Adanya Peraturan Daerah No.3 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bondowoso, 2. Adanya anggaran dana, 3. Sudah tersedianya alat pengomposan, 4. Sudah terbentuknya Bank Sampah di Masyarakat. Dan faktor penghambatnya adalah 1. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki, 2. Minimnya anggaran dana yang dimiliki, 3. Rendahnya kesadaran masyarakat, 4. Kurang optimalnya kampanye peduli sampah.

Kata Kunci: *Implementasi, Strategi, Pengelolaan Sampah*

ABSTRACT

Waste management in Bondowoso Regency has obstacles in its implementation, such as the accumulation of garbage in TPA that can not be researched in accordance with the standard. With the amount of waste production generated continues to increase it affects the waste management in the landfill. This study aims to describe the Implementation of Waste Management Strategy by the Department of Environment and Transportation Bondowoso. This type of research uses qualitative research with descriptive approach where the writer tries to describe about a certain state or social phenomenon. Data source is obtained from primary and secondary data. Data collection through observation, interview and documentation. The research analysis used interactive data model analysis which includes Data Collection, Data Reduction, Data Presentation and Concluding Drawing / Verification. From the results of this research in the Implementation of Waste Management Strategy by the Department of Environment and Transportation Bondowoso conducted that is 1. Garbage Transportation, 2. Land Expansion TPA, 3. Waste Management in TPA. Based on the result of this research, the implementation of waste management strategy in Bondowoso by Environment and Transportation Agency Bondowoso has not run optimally. Based on the results of this study can also note the factors that affect the implementation of waste management strategies in Bondowoso. There are supporting factors and inhibiting factors. The supporting factors are 1. The existence of Local Regulation No. 3 of 2011 on Waste Management in Bondowoso District, 2. The existence of budget funds, 3. The availability of composting tools, 4. Already the formation of Waste Banks in the Community. And the inhibiting factors are 1. Limitations of facilities and infrastructure owned, 2. Minimnya budget funds owned, 3. Low public awareness, 4. Less optimal campaign care waste.

Keywords: *Implementation, Strategy, Waste Management*

BAB 1 PENDAHULUAN

Masalah sampah merupakan fenomena sosial yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak, karena setiap manusia pasti memproduksi sampah. Besarnya timbunan sampah yang tidak dapat ditangani tersebut akan menyebabkan berbagai permasalahan yang timbul akibat kurangnya alternatif dan perspektif masyarakat terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sampah, baik langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung dari penanganan sampah yang kurang bijaksana diantaranya adalah berbagai penyakit menular maupun

penyakit kulit serta gangguan pernafasan, sedangkan dampak tidak langsungnya diantaranya adalah bahaya banjir yang disebabkan oleh terhambatnya arus air di sungai karena terhalang timbunan sampah yang dibuang ke sungai.

Sampah merupakan produk samping yang dihasilkan dari kegiatan manusia maupun proses alam yang membutuhkan penanganan secara konsisten karena keberadaannya dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan. Seiring berjalannya waktu, penanganan sampah menjadi persoalan

yang kompleks dimana jumlah sampah yang harus ditangani cenderung terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan aktifitas di perkotaan. Kondisi ini secara umum telah menjadi isu strategis lingkungan hidup perkotaan di wilayah Kabupaten Bondowoso.

Permasalahan sampah menjadi salah satu perhatian yang begitu penting bagi berbagai pihak terutama pemerintah. Selain kurangnya kesadaran dari masyarakat, melihat kebiasaan masyarakat yang melihat sampah sebagai barang yang sudah tidak mempunyai nilai guna. Paradigma lama pengolahan sampah lebih terfokus terhadap pembuangan sampah ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). Sedangkan area pembuangan sampah yang dimiliki Kabupaten Bondowoso tidak memenuhi standart sanitasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Bagaimanapun, seluas apapun lahan TPA tidak akan mampu menampung besarnya volume sampah yang ada jika tidak diimbangi dengan cara pengelolaan yang baik dan benar sesuai dengan standar pengelolaan sampah yang telah ditetapkan karena penambahan jumlah sampah yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang ramah lingkungan akan menyebabkan terjadinya kerusakan dan pencemaran Lingkungan. Maka diperlukannya kerjasama yang baik antara peran

Pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan persampahan.

Kegiatan manusia sadar lingkungan sangat perlu ditingkatkan yang dalam hal ini perlu melibatkan stakeholders dan peran dari pemerintah setempat untuk memberikan motivasi dan pengetahuan serta wawasan tentang pentingnya kepedulian terhadap lingkungan terutama mengenai masalah persampahan. Karena hal ini bukan hanya saja menjadi permasalahan di daerah. Namun menjadi permasalahan di tingkat pusat maupun internasional yang hingga kini masih sangat diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah persampahan.

Langkah – langkah menghadapi masalah yang dihadapi pemerintah dan masyarakat dalam menangani sampah terkait penanganan sampah serta pelaksanaan yang belum maksimal terhadap regulasi mengenai persampahan menjadi fokus permasalahan yang akan diteliti pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Bondowoso sehingga menemukan terobosan yang inovatif dalam hal pengelolaan sampah di kabupaten Bondowoso mengingat perilaku masyarakat yang sangat kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan agar dapat berjalan secara optimal dalam menghadapi problematika pengelolaan

sampah di Kabupaten Bondowoso. Apabila dikaji lagi, sampah bukan hanya menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat dan menjadi masalah dimana – mana. Apabila cara pengelolaan yang baik, maka terdapat peluang untuk memanfaatkan kembali sampah sehingga mempunyai nilai guna. Selain dapat membantu mengurangi timbulan sampah yang ada, hal ini dapat menjadi peluang pemberdayaan masyarakat sekitar. Oleh karena itu maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul skripsi “**IMPLEMENTASI STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN BONDOWOSO** (Studi di Kabupaten Bondowoso)”

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Implementasi

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Dalam mengkaji implementasi kebijakan publik, Edward III mulai dengan mengajukan dua pertanyaan, yakni:

1. *What is the precondition for successful policy implementation?*
2. *What are the primary obstacles to successful policy implementation?*

George C. Edward III berusaha menjawab dua pertanyaan tersebut dengan mengkaji empat faktor atau variabel dari

kebijakan yaitu struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi, disposisi. Model ini mengumpamakan implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

Model implementasi yang dikembangkan oleh George C. Edward III disebut dengan *Direct and Indirect Impact of Implementation*. Dalam penekatan yang diteorikan oleh George C. Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi;
2. Sumber Daya;
3. Disposisi; dan
4. Struktur Birokrasi.

Proses ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu kebijakan yang pada dasarnya dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi, yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengumpamakan implementasi kebijakan berjalan secara linier dari komunikasi, sumber daya politik yang tersediadan pelaksanaan implementasi kebijakan.

2.2 Aspek Peraturan/Hukum

Aspek Peraturan Hukum atau peraturan yang berlaku di setiap

kelompok sosial atau suatu bangsa berbeda-beda tergantung kesepakatan yang berlaku pada kelompok sosial atau bangsa tersebut. Sehingga aspek hukum harus dibuat berdasarkan tingkat kepentingan yang muncul pada suatu masyarakat di suatu wilayah, untuk itulah perlu dibuat aspek hukum yang sejalan dengan kebijakan otonomi daerah dalam kerangka pemerataan kesejahteraan nasional sebagai dasar pedoman dalam penentuan kebijakan yang akan dilaksanakan. Peraturan Perundang-undangan merupakan bagian dari hukum yang dibuat secara sengaja oleh lembaga negara. Hal tersebut muncul tidak secara tiba-tiba. Akan tetapi hal tersebut dibuat dengan tujuan dan beberapa alasan-alasan tertentu. Mengingat harus ada konsistensi dan korelasi antara apa yang ditetapkan sebagai politik hukum dengan yang ingin dicapai sebagai tujuan.

2.3 Aspek Kelembagaan

Aspek kelembagaan merupakan sebuah komponen yang penting dalam suatu wilayah, di samping itu mempunyai fungsi ataupun peranan sebagai agen sosialisasi perubahan terencana yang tumbuh dari masyarakat dan atau diprakarsai oleh pemerintah/stakeholder terkait. Lebih dari itu, dapat berperan sebagai perekat dan penguat keberhasilan dan keberlanjutan kegiatan-kegiatan yang

ada di lingkungan masyarakat. Setiap kelembagaan memiliki fungsi/peran yang berbeda. Organisasi dan manajemen mempunyai peran pokok dalam menggerakkan, mengaktifkan dan mengarahkan sistem pengelolaan sampah dengan ruang lingkup bentuk institusi, pola organisasi personalia serta manajemen. Institusi dalam sistem pengelolaan sampah memegang peranan yang sangat penting meliputi: struktur organisasi, fungsi, tanggung jawab dan wewenang serta koordinasi baik vertikal maupun horizontal dari badan pengelola.

2.4 Konsep Strategi

Dalam penelitian implementasi strategi pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan di Kabupaten Bondowoso, Kajian yang relevan untuk digunakan adalah pendekatan manajemen strategi. Dimana dalam mengelola sampah yang ada di kabupaten Bondowoso sangat dibutuhkan strategi yang baik yang mampu di Implementasikan oleh pihak yang bertanggung jawab yang mengemban tugas – tugas tersebut dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup. Strategi sebagai arah dan cakupan jangka panjang organisasi untuk mendapatkan keunggulan melalui konfigurasi sumber daya alam dan lingkungan yang berubah untuk mencapai kebutuhan dan memenuhi harapan pihak

yang berkepentingan (stakeholder). Secara umum, strategi merupakan cara atau proses yang digunakan untuk tercapainya sebuah tujuan. Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus, yang dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang tujuan yang diharapkan.

Menurut David Osborne dan Peter Plastrik (2004:31) Kata “Strategi” aslinya berasal dari konteks militer : kata *strategos* dari Yunani berarti “jenderal”. Jenderal yang baik memulai dengan menyusun strategi : bukan rencana operasional, tetapi pendekatan dasar yang mampu mengubah keseimbangan kekuatan di lapangan. Dalam hal pemerintahan, strategi yang dimaksud adalah penggunaan titik *dongkrak* utama untuk melakukan perubahan mendasar yang meliputi seluruh pemerintahan, yang mengubah segala – galanya. Pembaruan adalah pertempuran besar. pembaruan membutuhkan perjuangan panjang yang intensif dalam gelanggang politik, dalam lembaga – lembaga pemerintahan, dan dalam komunitas serta masyarakat.

2.5 Aspek Teknik Operasional

Aspek Teknis Operasional merupakan komponen yang paling dekat dengan obyek persampahan. Perencanaan sistem persampahan memerlukan suatu pola standar spesifikasi sebagai landasan

yang jelas. Spesifikasi yang digunakan adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 3242:2008 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman dan SNI 19-2454-2002, Tata cara teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan. Teknik operasional pengelolaan sampah bersifat integral dan terpadu secara berantai dengan urutan yang berkesinambungan yaitu: penampungan/pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan. Aspek Teknik Operasional merupakan salah satu upaya dalam mengontrol pertumbuhan sampah, namun pelaksanaannya tetap harus disesuaikan dengan pertimbangan kesehatan, ekonomi, teknik, konservasi, estetika dan pertimbangan lingkungan. Peraturan – peraturan tersebut melibatkan wewenang dan tanggung jawab pengelola kebersihan serta dalam menjaga kebersihan dan pembayaran retribusi.

BABI III METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun dalam metode yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Metode deskriptif adalah studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi tepat melukiskan secara akurat sifat sifat dari beberapa fenomena,

kelompok atau individu, menentukan frekuensi terjadinya suatu keadaan.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Bondowoso. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis data teori Miles dan Huberman (2007: 20) dengan melalui tiga tahapan yaitu:

1. Reduksi data
2. Display data
3. Pengambilan kesimpulan dan verifikasi.

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Strategi Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Bondowoso

Pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan berdasarkan strategi dan kebijakan yang dirumuskan maka dari hasil penelitian yang didapat yaitu sub bidang persampahan melaksanakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso sesuai dengan teknik operasional pengelolaan sampah berdasarkan Standar Nasional Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Bondowoso dalam

menjalankan strategi adalah sebagai berikut :

1. Pengangkutan Sampah

Pengangkutan sampah merupakan bagian dari pokok tugas dan pelaksanaan dalam pengelolaan sampah. Pengangkutan sampah ini dilakukan untuk mengangkut sampah dari TPS ke TPA. Dalam proses pengangkutan sampah yang dilakukan melalui kegiatan rutin pengangkutan sampah setiap harinya sudah terjadwal dan secara rutin dilakukan untuk menghindari adanya penumpukan sampah di TPS. Sebelum masuk di TPS, sumber sampah diambil menggunakan alat angkut berupa gerobak sampah setiap harinya. Sampah yang sudah masuk di TPS akan diangkut truk dan akan dibawa ke TPA untuk selanjutnya dilakukan pemrosesan akhir sampah. Kegiatan pengangkutan sampah yang dilakukan berupa truk dan armada pengangkut sampah yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Bondowoso.

2. Perluasan Lahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Bentuk strategi Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Bondowoso dalam pengelolaan sampah yaitu dengan meningkatkan pengembangan pengelolaan persampahan. Dalam ini TPA yang dimiliki oleh

Kabupaten Bondowoso masih belum sesuai dengan standar lahan TPA yang ditentukan. Lahan TPA yang saat ini digunakan luasnya 1,6 ha. Masih sangat jauh dari standar minimal lahan TPA yang telah ditetapkan yakni 5 Ha. Maka Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Bondowoso melakukan perluasan lahan TPA untuk memaksimalkan pemrosesan sampah. Perluasan lahan tempat pemrosesan akhir pada dasarnya adalah supaya dapat menampung volume sampah yang ada dan memaksimalkan proses pengelolaan sampah sesuai dengan standar pengelolaan persampahan. Karena luas areal tempat pemrosesan akhir sangat berpengaruh yang apabila luasnya tidak mencukupi maka akan terjadi penumpukan jumlah sampah di areal tempat pemrosesan akhir dengan melihat jumlah produksi sampah yang terus meningkat.

3. Pengolahan sampah di TPA

Sampah yang telah diangkut dari setiap TPS akan masuk ke TPA dan akan dilakukan pengolahan sampah. Pengolahan dilakukan agar dapat memanfaatkan sampah yang dinilai tidak bermanfaat menjadi nilai guna terutama bagi masyarakat. Karena jika hanya dilakukan penimbunan sampah tanpa adanya pemrosesan akhir dengan cara mengolahnya kembali maka TPA akan

meluap karena besarnya volume sampah yang terus meningkat. dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Bondowoso melakukan pengolahan sampah dengan proses pengomposan. Sudah alat yang digunakan untuk mengolah sampah organik menjadi pupuk organik. Hal ini mampu mengolah sampah sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dari hasil pengomposan. Masyarakat dapat menggunakan pupuk organik tersebut untuk tanamannya.

Hal ini juga dapat memberdayakan masyarakat sekitar yang bekerja sebagai pemulung untuk membantu proses pemilahan sampah yang kemudian dijual kepada pengepul. Hal ini tentunya menguntungkan kedua belah pihak antara Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan dengan masyarakat sekitar yang bekerja sebagai pemulung.

4.2 Faktor yang Mempengaruhi dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah

Dalam implementasi strategi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan terdapat faktor yang mempengaruhi yakni :

A. Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan faktor – faktor yang mendukung dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten Bondowoso yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Bondowoso. Faktor ini bisa berasal dari dalam organisasi ataupun luar organisasi. Berikut faktor yang mendukung pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso :

1. Adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah

Faktor pendukung pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso yaitu dengan adanya peraturan perundang – undangan yang berlaku, yakni Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah. Dengan adanya peraturan perundang – undangan yang berlaku maka dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah memiliki payung hukum.

2. Adanya Anggaran Dana

Salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Bondowoso tidak akan dapat dilakukan tanpa adanya anggaran. Anggaran merupakan faktor yang

menentukan kegiatan apa yang dapat dilakukan dengan dana yang ada. anggaran dana menjadi faktor yang menentukan dalam pelaksanaan strategi pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso. Karena jika tidak ada anggaran dana yang dimiliki maka pelaksanaan pengelolaan sampah tidak dapat dilakukan. Meskipun anggaran dana yang dimiliki terbatas, namun Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan khususnya bidang persampahan memaksimalkan penggunaan dana sehingga sampah yang ada dapat terlayani.

3. Sudah Tersedianya Alat Pengomposan dan Pengelolaan Gas Methane di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)

Salah satu faktor yang mendukung pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso yaitu dengan sudah tersedianya alat pengomposan dari sampah organik menjadi pupuk organik dan pengelolaan gas metan di TPA yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini juga menjadi salah satu kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Bondowoso dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso dibandingkan dengan daerah lain. Alat pengomposan ini menjadi alternatif yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Bondowoso dalam

pengelolaan sampah karena belum bisa menerapkan sistem *sanitary landfill* dengan keterbatasan lahan maka Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Bondowoso menerapkan sistem pengomposan untuk memanfaatkan sampah sehingga mempunyai nilai guna.

4. Partisipasi Masyarakat

Faktor yang mendukung Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Bondowoso dalam pelaksanaan pengelolaan sampah yaitu Partisipasi masyarakat dengan terbentuknya bank sampah di masyarakat. Hal ini dapat membantu proses pemilahan sampah dan mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA. Saat ini sudah terbentuk 15 Bank sampah yang tersebar di beberapa kelurahan. Walaupun belum berjalan secara maksimal, namun sudah cukup membantu dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di lingkungan sekitar dengan sistem 3R.

B. Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan faktor yang menjadi penghambat dari pelaksanaan yang dilakukan sehingga tidak bisa berjalan secara maksimal. Faktor yang menghambat bisa berasal dari dalam organisasi atau luar organisasi antara lain :

1. Terbatasnya Sarana dan Parasarana Pendukung Pelaksanaan Pengelolaan Persampahan

Sarana dan prasarana merupakan alat dan sumber daya penunjang yang digunakan dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan. Kelengkapan sarana dan prasarana atau fasilitas dinilai mampu mempengaruhi kelancaran dalam pelaksanaan pengelolaan sampah dari pengangkutan, pewadahan hingga pemrosesan akhir di TPA sangat diperlukan sarana dan prasarana yang menunjang.

Tabel 4.3.2 Kendaraan Pengangkutan Sampah

No	Jenis Kendaraan	Merk / Tahun	No.Kendaraan
1	Dump Truck	Isuzu / 1992	L 9650 CM
2		Isuzu / 1995	P 8005 AP
3	Arm Roll	Isuzu / 2001	P 8011 AP
4		Isuzu / 1992	P 8012 AP
5		Isuzu / 1995	P 8047 AP
6		Isuzu / 1995	P 8055 AP
7		Hino / 2015	P 8180 AP
8	Truck Engkel	Isuzu Ps 120	P 8048 AP
9	Excavator	D-320 Cater Pilar / 2001	

Sumber : Data Infrastruktur Pemukiman Sub Bidang Persampahan

sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan pengelolaan

sampah di Kabupaten Bondowoso masih terbatas. Sehingga mempengaruhi pelaksanaan yang selama ini belum bisa optimal. Selain itu perlunya perawatan sarana dan prasarana agar tidak cepat rusak yang berakibat mengganggu proses pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini diperlukannya pendanaan yang besar yang dalam kenyataannya anggaran yang dimiliki masih sangat minim.

2. Anggaran dan Pendanaan yang Minim

Salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten bondowoso adalah minimnya pendanaan yang dimiliki sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Bondowoso dalam pelaksanaan pengelolaan sampah karena keterbatasan anggaran dan pendanaan yang dimiliki sehingga tidak dapat menjalankan program kegiatan yang dibutuhkan.

3. Kesadaran Masyarakat

Sumberdaya masyarakat disini menjadi faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso. Karena dari pihak pemerintah daerah dan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan sendiri telah

melakukan kegiatan pengelolaan sampah secara maksimal namun apabila tidak didukung dengan sumberdaya masyarakat yang peduli terhadap lingkungan maka pengelolaan sampah belum bisa optimal salah satu faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan di Kabupaten Bondowoso yaitu karena kurangnya kesadaran dari masyarakat. Pola pikir serta kebiasaan masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya masih belum bisa terlaksana dengan baik. Sedangkan untuk memaksimalkan pelaksanaan pengelolaan persampahan di Kabupaten Bondowoso diperlukan kerjasama antara pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Bondowoso, dan peran serta masyarakat untuk ikut andil dalam proses pengelolaan sampah. Dimana masyarakat sendiri mempunyai peran yang penting dalam jalannya pelaksanaan pengelolaan persampahan di Kabupaten Bondowoso.

4. Kampanye Peduli Sampah Kurang Optimal

Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso yang menjadi hambatan adalah karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan untuk memberikan pengetahuan serta merubah kebiasaan masyarakat mengingat sumber daya masyarakat serta kesadaran masyarakat tentang kepedulian lingkungan

terutama mengenai masalah persampahan masih rendah maka perlunya sosialisasi kepada masyarakat. bahwa sosialisasi terhadap masyarakat sangat penting. Melihat faktor masyarakat yang masih perlu mendapatkan sosialisasi mengenai pengetahuan tentang lingkungan hidup khususnya dalam pengelolaan persampahan. Namun karena keterbatasan anggaran yang dimiliki maka sosialisasi atau kampanye peduli sampah masih belum bisa dioptimalkan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai Implementasi Strategi Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Bondowoso upaya yang dilakukan dalam pengelolaan sampah oleh bidang persampahan adalah sebagai berikut :

1. Pengangkutan Sampah

Salah satu implementasi strategi pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Bondowoso yaitu dengan mengoptimalkan pengangkutan sampah. Pengangkutan dilakukan secara rutin setiap harinya dengan jadwal yang telah ditetapkan. Maka

dengan hal ini kegiatan pengelolaan sampah diharapkan tidak sampai meluap di tiap – tiap TPS yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.

2. Perluasan Lahan TPA

Perlunya perluasan Lahan TPA agar mampu menampung jumlah sampah yang masuk ke TPA supaya dapat menerapkan sistem pengolahan sampah dengan *Sanitary Landfill*. Dari kegiatan ini areal tempat pemrosesan akhir sampah diharapkan mampu menampung jumlah volume sampah yang dihasilkan setiap harinya yang terus meningkat.

3. Pengolahan Sampah di TPA

Pengolahan sampah yang dilakukan di tempat pemrosesan akhir oleh Dinas lingkungan Hidup dan Perhubungan Bondowoso menggunakan sistem pengomposan untuk sampah organik. Pemrosesan dari sampah organik ini dapat menjadi pupuk organik yang dapat digunakan oleh masyarakat sekitar. Selain itu jenis sampah lainnya dilakukan pencacahan menggunakan mesin pencacah plastik. Terlebihnya Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar

yang bekerja sebagai pemulung untuk mengambil sampah plastik dan kaca untuk dijual kembali ke pengepul.

Pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Bondowoso memiliki beberapa faktor yang memengaruhi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso. Terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yaitu :

1. Faktor Pendukung

Yang menjadi faktor pendukung jalannya pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso antara lain :

- Sudah adanya Perda (Peraturan Daerah) Nomor 3 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah.
- Adanya anggaran dana yang dimiliki.
- Telah tersedianya alat pengomposan dan pengelolaan *gas methane*.
- Bentuk Partisipasi masyarakat dengan adanya bank sampah di masyarakat .

2. Faktor Penghambat

Yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso antara lain :

- Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang .
- Minimnya Sumber Dana Keuangan yang dimiliki oleh Sub Bidang Persampahan .
- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk peduli lingkungan dan pola pikir serta kebiasaan – kebiasaan masyarakat yang sebagian masih belum mampu untuk membuang sampah pada tempatnya.
- Kurang optimalnya kampanye peduli sampah kepada masyarakat.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan serta kesimpulan yang telah dijabarkan diatas, dari beberapa hambatan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Bondowoso dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso maka peneliti dapat memberikan saran atau masukan yang mungkin akan berguna dalam peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Bondowoso khususnya Sub Bidang Persampahan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso diantaranya :

1. Berkaitan dengan terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengelolaan persampahan dari proses

pengangkutan hingga pemrosesan sampah di di TPA, maka diperlukan penambahan armada pengangkut sampah hingga alat pemrosesan akhir sampah di TPA dengan mengajukan penambahan anggaran untuk pengelolaan persampahan.

2. Berkaitan dengan keterbatasan keuangan/anggaran yang dimiliki oleh Dinas lingkungan Hidup dan Perhubungan Khususnya Sub Bidang Persampahan, maka diperlukan adanya penambahan anggaran dan penghematan dana yang ada agar dapat melaksanakan operasional pelaksanaan pengelolaan persampahan dengan optimal. Hal ini juga berkaitan dengan perlunya pengajuan Peraturan Bupati tentang pengelolaan persampahan agar ruang gerak dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan di Kabupaten Bondowoso lebih luas.

3. Berkaitan dengan rendahnya kesadaran masyarakat serta pola pikir dan kebiasaan masyarakat yang masih belum bisa membuang sampah pada tempatnya dapat dilakukan sosialisasi secara rutin untuk memberikan pengetahuan terhadap masyarakat tentang

kepedulian lingkungan dan pengelolaan sampah lingkungan.

4. Berkaitan dengan kurang optimalnya kampanye peduli sampah maka diperlukan pemerataan anggaran sehingga program kegiatan termasuk sosialisasi terhadap masyarakat tetap dapat dilakukan.